

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan material dasar bagi manusia merupakan hal yang harus dipenuhi. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi bagian, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Ketiga kebutuhan tersebut memang diperlukan dalam kehidupan, namun pada kesehariannya, kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan utama untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok utama yang wajib dipenuhi. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dalam memakai pakaian yang layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dalam pemenuhan sumber makanan bagi manusia yang digunakan untuk energi dalam menjalankan aktivitas. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan dalam hal tempat tinggal sebagai tempat beteduh dan beristirahat di dalam rumah. Tempat tinggal menjadi tempat bernaung yang aman dan nyaman bagi keberlangsungan hidup. Ketiga kebutuhan primer tersebut termasuk ke dalam kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi jika salah satunya mengalami ketidakcukupan maka akan terjadi kesulitan dalam keberlangsungan hidup di dunia.

Indonesia adalah negara yang luas dengan beraneka ragam suku, ras agama dan budaya. Sebagai negara yang luas tidak dipungkiri bahwa Indonesia menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan. Pemahaman mengenai

kemiskinan bukan sekedar tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar seperti sandang, pangan dan papan, tetapi mencakup rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. BPS mencatat penduduk miskin di Banten jumlahnya meningkat 12,11 ribu orang menjadi 826,13 ribu orang pada Maret 2023. penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 sebesar 5,89 persen atau 586,210 orang, naik menjadi 6,00 persen atau 623,190 orang pada Maret 2023.¹ Maka dari itu pengentasan tingkat kemiskinan masih menjadi fokus dalam program pemerintahan saat ini.

Pemerintah mengatur strategi untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program kebijakan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan peraturan presiden tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui program kebijakan berupa memberikan bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat.

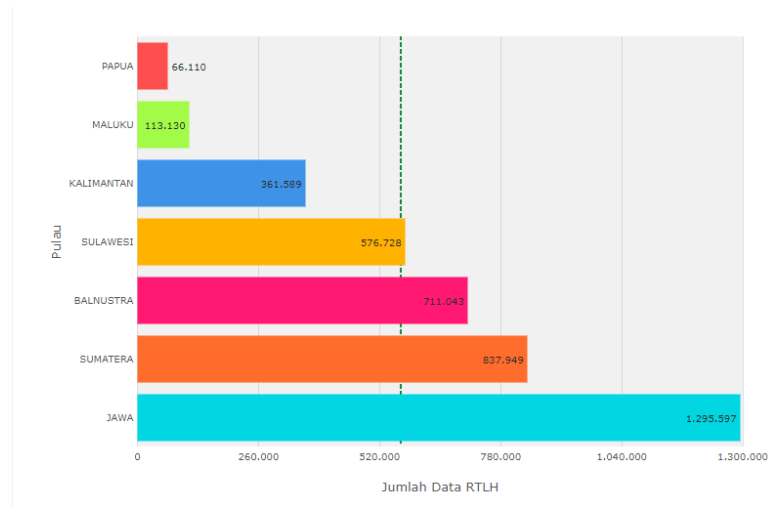
Memiliki rumah layak huni merupakan hak dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H hasil amandemen ke IV yang menjelaskan bahwasanya “Rumah adalah suatu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat

¹ Kompas, “Kemiskinan Perkotaan Meningkat, Pj Gubernur Banten Salahkan Urbanisasi,” Kompas.com, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/07/18/175807778/kemiskinan-perkotaan-meningkat-pj-gubernur-banten-salahkan-urbanisasi?page=all>.

tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal tersebut menyatakan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah karena di dalam rumah memiliki fungsi penting dalam upaya pembentukan watak, karakter dan keperibadian bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut diharapkan memiliki nilai efektif yang bermanfaat untuk masyarakat miskin. Program yang dibuat pemerintah tak hanya berfokus pada bantuan usaha ekonomi produktif seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun bentuk bantuan lain seperti raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah juga fokus dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) karena masih banyaknya rumah yang belum layak huni di berbagai daerah di Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau tertinggi pertama dengan rumah tidak layak huni terbanyak di Indonesia dengan total sebanyak 1.295.597 rumah yang belum layak huni.

Gambar 1.1 Jumlah RTLH Seluruh Pulau di Indonesia



(Sumber: <https://datartlh.perumahan.pu.go.id>)

Banten merupakan salah satu provinsi yang menduduki pulau Jawa. Provinsi dengan salah satu penduduk terpadat di Indonesia ini masih memiliki PR dalam mengatasi RTLH. Kota Serang melaksanakan program RS-RTLH sebagai upaya untuk penanggulangan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Alasan lain pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program RS-RTLH karena program tersebut merupakan program prioritas kebijakan dan pembangunan dalam rumah tangga tepatnya pada poin ke empat oleh pemerintah Kota Serang, yakni terciptakayaan dan infrastruktur perumahan dan pemukiman.

Wali Kota Serang lebih lanjut menjelaskan bahwa ribuan rumah tidak layak huni telah tersebar di enam kecamatan di Kota Serang terbanyak diantaranya tertuju pada kecamatan Kasemen.²

RS-RTLH merupakan program yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah yang belum memenuhi standar untuk dihuni untuk mendapatkan taraf kehidupan yang cukup dan memiliki hunian yang layak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kecukupan kebutuhan masyarakat miskin. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki sebagian maupun keseluruhan rumah yang tidak layak huni untuk terciptanya kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Penanggungjawab pelaksana kegiatan program RS-RTLH yakni Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggungjawab Kemiskinan. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya penyaluran bantuan RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Pedesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan.

Pada penyelenggaraan kegiatan bantuan perbaikan RTLH di Kecamatan Kasemen melibatkan Lembaga dinas daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, camat dan desa lokasi, serta masyarakat penerima manfaat. Dinas

² Banten Intens, "Di Kota Serang Masih Ada 3.400 Rumah Tidak Layak Huni," Banten Intens, 2020, <https://bantenintens.co.id/2020/12/08/di-kota-serang-masih-ada-3-400-rumah-tidak-layak-huni/>.

Sosial sebagai *leading sector* program RS-RTLH. Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH di Kecamatan Kasemen bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Camat Lokasi dan Desa Lokasi, masyarakat penerima manfaat dan untuk menunjang pelaksanaan program RS-RTLH Kecamatan Kasemen dibentuk Tim Koordinasi RS-RTLH, Unit Pelaksana Program (UPP) yaitu menunjuk FSKSS, dan Tim Pelaksana RS-RTLH. Unit Pelaksana Program (UPP) yaitu lembaga pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui *leading sector* nya yang menjadi fasilitator dan pihak utama yang melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana Program tingkat desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas sosial kota Serang di Kecamatan Kasemen?
2. Seberapa besar pengaruh kebijakan bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas sosial kota Serang di Kecamatan Kasemen?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas sosial kota Serang di Kecamatan Kasemen.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas sosial kota Serang di Kecamatan Kasemen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial khususnya pada pengembangan masyarakat islam. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya yang membahas fenomena serupa, khususnya berkaitan dengan pengaruh kebijakan bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu serta masukan pada pemerintah terkait dalam membuat kebijakan

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk mendapatkan pengalaman secara ilmiah dengan merujuk pada kaidah penyusunan dan penulisan laporan penelitian, sehingga dapat memperluas wawasan dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi penelitian terkait kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat.

c. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk menjadi bahan rujukan penelitian yang meneliti topik serupa. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan saat ini dan menjadi satu sumbangan pemikiran untuk Dinas Sosial Kota Serang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian dengan sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima BAB pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menjelaskan paparan teori, kerangka berfikir, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan, serta hipotesis penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, mendeskripsikan dari variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian dengan menjelaskan menguji variabel penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya